

Masyarakat dan Kebudayaan Cina

Gondomono

ABSTRACT *This paper attempts to trace the identity construction of the Chinese from cultural anthropology perspective. It argues that the constructed identity is always changing and very much influenced by socio, economic, political and cultural aspects. By looking at the society, the language, the kinship and belief systems, it comes to a conclusion that the identity is not as simple as it looks. In fact, it often embodies a misperception of what it this to be Chinese. In this context, emphasises the needs for further develepment of Chinese studies in Indonesian universities.*

KATA KUNCI *Masyarakat, negara, nilai, identitas, Studi Cina*

Membicarakan suatu masyarakat dengan sendirinya harus juga membicarakan kebudayaannya. Tiada masyarakat tanpa kebudayaan, dan tidak ada kebudayaan yang melayang-layang di angkasa tanpa masyarakat pendukungnya. Demikian juga dengan kebudayaan Cina. Kebudayaan Cina didukung oleh masyarakat Cina yang sebagian besar tinggal di benua Asia bagian timur dan selebihnya tersebar di seluruh dunia sebagai warga pelbagai negara. Khusus mengenai masyarakat dan kebudayaan Cina ini, mengingat sejarahnya begitu panjang, wilayahnya begitu luas, jumlah penduduknya begitu banyak, dan ada beberapa hal yang rancu, maka ada baiknya jika beberapa segi kebudayaan tersebut mendapat penjelasan lebih lanjut.

Uraian ini hanya meliputi beberapa segi kajian masyarakat dan kebudayaan China dengan ancatan antropologi budaya untuk melengkapi apa yang biasa disebut Sinologi yang lebih menekankan pada kajian bahasa, kesusastraan, sejarah, dan filsafat Cina. Pada bagian penutup, uraian dikaitkan dengan pasang-surut kajian mengenai masyarakat dan kebudayaan Cina di Indonesia.

JATIDIRI ATAU SEBUTAN "CINA"

Sebenarnya orang Cina tidak menciptakan sebutan "Cina" atau sebutan lain yang lafalnya mirip dengan lafal kata tersebut. Sejak empat sampai lima ribu tahun yang lalu, sejumlah kecil penduduk kerajaan di sekitar bagian tengah Sungai Huang (Kuning), hingga kemudian menjadi 1,2 miliar

warga dari negara yang sekarang menjadi RRC (Republik Rakyat Cina), menggunakan acuan yang berubah-ubah untuk menyebutkan jatidiri mereka. Orang-orang yang sudah mempunyai kesadaran bernegara akan menggunakan nama negara sebagai acuan, walaupun apa yang dinamakan negara pada waktu itu tidak lebih besar dari sebuah provinsi yang kecil dari wilayah RRC sekarang. Konghucu, misalnya, adalah orang Lu karena ia berasal dan dilahirkan di sebuah negara kecil yang bernama Lu (yang hanya meliputi sebagian dari Provinsi Shandong [baca: shantung] sekarang). Contoh lain adalah orang-orang Cina di Indonesia sampai tahun limapuluhan abad ini, masih ada yang menyebut dirinya Tengleng (Tangren dalam bahasa nasional Cina), atau orang Tang karena mereka mengacu pada nama Dinasti Tang yang besar dan panjang itu (618–907). Mereka kebanyakan datang dari Provinsi Fujian (baca: fucien) yang tidak masuk wilayah kekuasaan kaisar-kaisar dinasti Han tetapi baru bisa dimasukkan ke dalam wilayah Cina ketika kaisar-kaisar Tang berkuasa. Oleh karena itu, mereka lebih mengenal Tang sebagai penguasa daripada dinasti-dinasti besar sebelumnya, seperti Qin (221–06 SM) atau Han (206 SM–221 AD). Tetapi orang-orang di pedesaan biasanya mengacu pada nama desanya atau mungkin nama sebuah wilayah sebesar kelurahan, kecamatan, atau kabupaten. Ada juga yang menyebut dirinya orang Amoy (atau Xiamen, baca: syiamen) karena mereka meninggalkan tanah airnya menuju Asia Tenggara atau Amerika Serikat melalui salah satu pelabuhan di Fujian Selatan, yaitu Amoy.

Kata “Cina” mula-mula diterapkan oleh orang-orang Eropa berdasarkan nama dinasti, yaitu Qin (baca: Chin, 255–06 SM), yang menjadi besar berkat salah seorang raja dinasti ini, yaitu Qin Shi Huangdi (baca: Chin She Huanti). Ia adalah kaisar pertama yang ada pada masa pemerintahannya (221–10 SM) yang bisa menguasai wilayah yang amat luas untuk ukuran pada waktu itu. Meskipun wilayah kekuasaan Qin hanya meliputi seperdelapan wilayah RRC sekarang, yaitu hanya meliputi kira-kira delapan provinsi di RRC bagian timur saja, para sejarawan Barat menyebut Qin Shi Huangdi sebagai penyatu (Cina) yang pertama.

Qin Shi Huangdi juga merupakan penguasa yang pertama-tama menggunakan gelar *Huangdi*, yaitu “kaisar” atau “maharaja,” dan bukan sekadar *Wang* (raja), seperti penguasa-penguasa sebelumnya. Ia pula yang menciptakan sentralisasi pemerintahan, sistem jalan-jalan yang memancar dari ibu kota ke seluruh wilayah kekuasaannya. Ia juga memerintahkan untuk menyambung-nyambung tembok yang didirikan raja-raja sebelumnya menjadi satu tembok panjang serta proyek-proyek raksasa lainnya. Namun, Qin Shi Huangdi pula yang menggunakan tenaga kerja paksa untuk mengerjakan proyek-proyek raksasanya sehingga menelan korban ribuan orang. Ia pula yang menyuruh membakar kitab-kitab ilmu pengetahuan dan sejarah, kecuali sejarah Qin, kitab mengenai obat-obatan, ramal-meramal, dan kehutanan (Li 1971) yang disimpan di perpustakaan istana. Karena julukan Cina itu mengingatkan orang pada kekejaman dan dosa Qin Shi Huangdi itulah, maka kelompok etnik mayoritas yang tinggal

di bagian timur benua Asia ini tidak mengacu pada dinasti Qin, tetapi pada nama dinasti besar berikutnya, yaitu dinasti Han (206 SM – 20 M). Kelompok etnik yang merupakan sebagian besar (94 persen) penduduk RRC sekarang menggunakan jatidiri Han, bahasa nasionalnya juga disebut bahasa Han, begitu juga kebudayaannya. Sejak tahun 1912 negaranya disebut Chunghua Minkuo, kemudian sejak Oktober 1949 menjadi Zhonghua Renmin Gengheguo (baca: Cunghua Renmin Kungkekua). Kedua-duanya disingkat menjadi Zhongguo (baca: Cungkua, atau dalam lafal Hokkian yang pernah dikenal di Indonesia: Tiongkok). Selain istilah China-Chinese (Inggris), China-Chinees (Belanda), La Chine-Chinois (Prancis), Cina (Itali), orang Inggris dahulu pernah juga menggunakan Cathay, sedangkan orang Rusia menggunakan Khitaya. Namun, bangsa-bangsa lain tidak ada yang menggunakan Khatiya. Bangsa-bangsa lain tidak ada yang menyebut Zhongguo untuk negaranya dan Zhonghua untuk penggunaan ajektiva, atau Han untuk masyarakat dan kebudayaannya.

Bentuk terikat "sino-" juga banyak digunakan dalam ilmu pengetahuan atau penggunaan umum lainnya, seperti "*sinanthropus pekinensis*" untuk makhluk purba yang tengkorak kepalanya ditemukan di dekat Beijing (baca: peicing), sinologi, Sino-Japanese, Sino-Tibetan, Sino-Indian dan sebagainya. Dengan istilah itu pula beberapa pakar ilmu sosial lebih suka menggunakan istilah-istilah seperti bangsa Sinitik, kebudayaan Sinitik, bahasa Sinitik, aksara Sinitik, agar bisa menyebut kebudayaan yang sudah ada sebelum dinasti Han (206 SM – 221). Aneh rasanya jika Konghucu disebut orang Han karena ia sudah meninggal (pada 479 SM) jauh sebelum dinasti Han muncul. Demikian juga para pakar linguistik akan menyebut bahasa yang digunakan seribu tahun lebih sebelum dinasti Han, sebagai bahasa Sinitik yang kemudian menurunkan sub-subbahasa Sinitik yang masih digunakan sekarang di RRC maupun di Taiwan. Sedangkan tulisan yang "terukir" pada tempurung penyu untuk keperluan ramal-meramal dan keperluan religius lainnya, yang ditemukan pada zaman dinasti Shang (1766 – 1112 SM), dan yang sampai sekarang masih digunakan di RRC, Taiwan, Jepang atau Korea, disebut tulisan Sinitik. Secara resmi di RRC tulisan ini disebut Hanzi, atau aksara Han, sedangkan di Jepang dari dulu sampai sekarang disebut Kanji yang juga berarti aksara Han.

Namun, karena bangsa-bangsa Eropa dan Amerika, yang lebih suka menggunakan istilah Cina, menguasai media massa dan berkat penyebaran ilmu pengetahuan sosial dan budaya melalui pendidikan, nama Cina, atau ragam lain menurut lafal dan ejaan bahasa Inggris, Belanda, Prancis dan sebagainya, selalu digunakan di seluruh dunia sampai sekarang, termasuk oleh orang Cina sendiri walaupun mereka merasa kurang sesuai.

NEGARA DAN WILAYAHNYA

Seperti halnya dengan nama "Cina," negara yang mula-mula hanya meliputi wilayah kecil di sekitar bagian tengah dan hilir Sungai Huang (Sungai Kuning atau Huanghe), baik namanya maupun luas wilayahnya berubah-ubah sepanjang sejarah, namun selalu mencakup daerah

sepanjang tepi sebelah kanan dan kiri aliran Sungai Huang. Wilayah negara mula-mula hanya meliputi sebagian provinsi Henan, Hebei, dan sebagian Shandong pada zaman dinasti Xia (2205–1766 SM). Pada zaman Dinasti Qin (221–06 SM), wilayahnya terlalu panjang meluas hingga meliputi bagian Timur RRC serta Vietnam sekarang, dikurangi beberapa provinsi. Ketika Cina dikuasai oleh bangsa Mongol yang mendirikan dinasti Yuan (1206–1368), wilayahnya lebih meluas lagi hingga Eropa Timur, Laut Hitam, Iran, Tibet, Vietnam, Manchuria, dan Korea. Pada waktu kelompok etnik Han berkuasa kembali, pada zaman dinasti Ming (1368–1644), wilayah itu sejak dulu merupakan tempat tinggal sebagian besar penduduk Cina. Pada awal zaman dinasti Qing (1644–1911), wilayahnya meluas lagi ke barat dan utara sehingga meliputi Tibet dan Republik Mongolia sekarang, namun menjelang keruntuhan kekaisaran terakhir dari dinasti Qing wilayahnya berkurang lagi karena wilayah sebelah utara Sungai Amur diambil oleh Rusia.

Sekarang pemerintah RRC masih menguasai wilayah yang amat luas, termasuk Tibet dan Xinjiang (baca: shinciang), tetapi apa yang dulu disebut Mongolia Luar sudah berdiri sebagai negara tersendiri, sedangkan Taiwan masih menjadi sengketa antara dua pemerintahan Cina dengan sistem politik dan kenegaraan yang berbeda. Sekalipun wilayah negara itu meluas dan mengecil sepanjang sejarah, yang disebut “wilayah Cina (secara budaya) sesungguhnya” oleh banyak pakar ilmu sosial hanya meliputi bagian timur saja, yaitu dari Provinsi Hebei di utara sampai Guangxi (baca: kuangsyi) dan Yunnan di selatan dan Sichuan (baca: secuan) di sebelah barat.

MASYARAKAT CINA

Orang-orang dengan jatidiri budaya Cina berjumlah besar sekali dan tersebar di daratan Asia Tengah, Timur, dan Timur Laut, atau di negara yang sekarang disebut RRC, maupun di negara-negara lain di seluruh dunia, walaupun kadar budaya Cina mereka bermacam-macam. Pada pihak lain, penduduk negara RRC yang telah melebihi 1,2 milyar itu, 94 persen (Sinclair 1987) terdiri dari satu kelompok etnik yang menyebut dirinya orang Han, dan secara etnis juga terdiri dari 56 kelompok etnik minoritas dengan jumlah sekurang-kurangnya 70 juta orang pada tahun 1980-an. Kelompok-kelompok etnik minoritas tersebut kebanyakan tinggal di wilayah-wilayah pinggir RRC yang jauh dari ibu kota, sedangkan selebihnya tersebar di seluruh wilayah RRC termasuk ibu kota Beijing.

Karena kelompok etnik Han begitu besar jumlah dan persentasenya, maka banyak orang mengira bahwa penduduk RRC itu homogen, padahal jumlah kelompok etnik seluruhnya, seperti telah disebutkan, banyak sekali. Jatidiri etnik kelompok-kelompok etnik tersebut tidak sesederhana seperti yang diduga. Menurut penelitian yang dilakukan pada tahun 1970-an (Fei 1981), misalnya, dulu ada orang-orang warga kelompok mayoritas Han yang bermigrasi ke wilayah yang didominasi oleh kelompok etnik minoritas tertentu. Beberapa generasi kemudian, keturunan orang Han tersebut, karena

beratus tahun terputus hubungannya dengan orang Han lainnya, lalu memeluk budaya setempat, termasuk bahasanya. Mereka menganggap dan dianggap diperlakukan lain, serta didiskriminasi oleh orang-orang Han yang datang kemudian. Oleh karena itu, keturunan orang Han yang sudah tidak dianggap sebagai orang Han itu menuntut agar mereka diakui sebagai kelompok minoritas tersendiri.

Sebaliknya, beberapa kelompok etnik minoritas selama beberapa ratus tahun yang lalu menyebar ke wilayah yang didominasi oleh kelompok etnik Han. Beberapa kelompok di antaranya begitu dipengaruhi oleh kebudayaan Han sehingga mereka telah meninggalkan bahasanya sendiri maupun tradisi lainnya. Ada pula kelompok etnik yang mengambil alih tradisi dan gaya hidup kelompok etnik tetangganya, tetapi masih mempertahankan bahasa dan nama kelompoknya sendiri. Ada pula kelompok etnik yang diragukan sebagai kelompok etnik tersendiri karena ada yang menganggap mereka masih merupakan bagian dari kelompok etnik lainnya.

Di dalam kelompok etnik Han sendiri terdapat perbedaan linguistik dan fisik yang besar. Misalnya, sekelompok keturunan Han menyebut dirinya orang Tanka karena cara berpakaian, kebiasaan, dan bahasa mereka berbeda dengan orang Han pada umumnya. Pada pihak lain, orang Kanton, atau Penti yang juga banyak tersebar di Hongkong, Hawaii, dan pantai barat Amerika Serikat akan tersinggung jika mereka tidak dianggap sebagai orang Han, walaupun mereka menggunakan bahasa yang sama sekali tidak dimengerti orang Han dari Beijing, atau orang Cina Utara pada umumnya. Secara ragawi orang-orang Kanton pada umumnya lebih pendek dibandingkan dengan orang Cina Utara yang tinggi besar. Orang Hakka, yang selalu dianggap "tamu" dan karena itu tidak begitu "diterima" oleh kelompok etnik Cina yang lain mana pun, sesungguhnya juga keturunan dan termasuk kelompok etnik Han yang merupakan kelompok mayoritas penduduk RRC. Apakah orang-orang Hakka seperti Deng Xiaoping, "orang besar" yang kecil tubuhnya itu, atau mantan Perdana Menteri Singapura Lee Kuan Yu yang tinggi besar itu bukan keturunan Han dan karena itu tidak dimasukkan kelompok Han?

Keanekaragaman penduduk negara terluas di Asia itu merupakan akibat dari proses perubahan yang sangat kompleks sepanjang ribuan tahun. Ada yang tumbuh dan ada yang hilang, ada yang menetap, ada yang berpindah-pindah, ada yang menyatu dengan kelompok lain dan ada pula yang memisahkan diri.

Di Indonesia masyarakat etnik Cina dan sebutannya juga beragam. Mereka sering menyebut dan disebut dengan nama kelompok linguistiknya seperti Hokkian, Kwongfu, Teociu, Hainan, Hinghua, Hakka, dan lain-lain. Ada pula yang mengelompokkan mereka menjadi dua saja, yaitu Cina Peranakan atau Keturunan Cina atau "keturunan" saja (suatu istilah yang ajaib), dan Cina Totok atau Singkek, Sengkek. Ada pula yang mengelompokkan mereka menjadi satu dengan Cina, Cino, Cinten (Jawa), Tionghoa, Tenglang, dan sebagainya. Ada pula yang berdasarkan kewarganegaraannya disebut WNA (Warga Negara Asing) dan WNI (Warga

Negara Indonesia) untuk menghindari penggunaan sebutan Cina yang dianggap peyoratif.

KEBUDAYAAN CINA

Pembahasan kebudayaan apa pun cenderung membicarakan "kebudayaan agung," yang kadang-kadang hanya ideal, atau pada umumnya hanya didukung sejumlah kecil golongan elit, dan mengabaikan "kebudayaan jelata" yang justru merupakan kenyataan terbesar karena didukung oleh sebagian besar penduduk. Demikian pula kebudayaan Cina. Kebudayaan para petani dan orang-orang di pedesaan pada umumnya, yang pada masa yang lampau pernah melebihi 85 persen jumlah seluruh penduduk negeri Cina, jarang sekali muncul ke permukaan apalagi ditonjolkan sebagai bagian (yang utama) dari kebudayaan Cina, sedangkan kebudayaan golongan elit penguasa, orang-orang kaya, dan golongan terpelajar lebih sering dikemukakan, dan karena itu lebih dikenal orang-orang di luar Cina. Seorang pakar ilmu sosial, Levy, mengemukakan bahwa pada zaman Cina "tradisional" (sampai kira-kira abad ke-19) dan zaman "transisi" (yaitu sampai RRC berdiri), masyarakat Cina terdiri dari dua golongan yang sangat berbeda, yaitu kaum petani dan kaum *shenshi* (kaum *gentry*). Gaya hidup kaum *shenshi* yang merupakan contoh "tradisi agung" biasanya dianggap mewakili kebudayaan Cina sebagai keseluruhan di dalam karya-karya susastra maupun karya akademis, padahal kaum petani, pendukung "tradisi jelata" yang jumlahnya jauh lebih besar daripada kaum *shenshi*, sama sekali tidak menjalani gaya hidup kaum *shenshi* (Levy 1949).

Demikian juga banyak yang mengira bahwa keluarga Cina tradisional adalah keluarga besar yang terdiri dari lima generasi yang tinggal di bawah satu atap. Pada hakikatnya sebagian terbesar penduduk pedesaan yang tidak kaya dan masih buta huruf itu hanya terdiri dari 4,1 hingga 5,9 jiwa setiap keluarga (Yang 1965). Oleh karena itu, agak sulit dibayangkan bahwa keluarga yang anggotanya hanya empat orang, termasuk kepala keluarga, bisa terdiri dari tiga generasi atau bahkan lebih. Demikian pula tradisi mengikat kaki perempuan yang sudah berumur empat ribu tahun. Tradisi untuk "mempercantik" wanita hanya dijalankan oleh golongan elit (termasuk kaum *shenshi*) yang mampu dan dari subkelompok etnik tertentu saja. Bagaimana istri para petani bisa bekerja membantu suaminya di sawah ladang jika kaki mereka diikat sehingga jalan pun sulit dan sangat menyakitkan? Namun, kedua macam tradisi itu memang pernah ada dan karena itu kajian mengenai kebudayaan Cina seyogyanya meliputi baik tradisi "yang agung" maupun "yang jelata" untuk memperoleh gambaran yang lengkap mengenai kebudayaan-kebudayaan Cina.

BAHASA SINITIK

Seperti telah dikemukakan, tuturan yang digunakan sebagian terbesar penduduk di RRC sekarang adalah apa yang oleh para pakar linguistik disebut sub-subbahasa Sinitik. Subbahasa yang terbesar adalah *Beifanghua*,

bahasa daerah utara, yang penuturnya meliputi lebih dari dua pertiga seluruh penutur subbahasa Sinitik. *Beifanghua* lebih dikenal dengan nama bahasa Mandarin, sekali lagi nama yang diterapkan dan kemudian disebarluaskan oleh orang-orang Barat. Pada awalnya nama bahasa Mandarin digunakan untuk menyebut salah satu bahasa Utara yang digunakan oleh para pejabat istana kekaisaran yaitu Guanhua, atau "bahasa resmi." Sekarang sebuah bahasa yang juga didasarkan pada salah satu bahasa Utara digunakan sebagai bahasa baku dengan nama *Putonghua* atau "bahasa umum" yang memang dipromosikan oleh Pemerintah RRC sebagai bahasa untuk digunakan secara umum di seluruh negara. Sebuah ragam bahasa yang hampir sama, digunakan sebagai bahasa nasional di Taiwan oleh pemerintah di Taiwan dan disebut *Guoyu* atau "bahasa nasional."

Menurut Moser, subbahasa Sinitik yang terbesar, yaitu *Beifanghua*, atau yang sudah dikenal dengan nama Bahasa Mandarin, terdiri dari lima dialek yang utama. Yang pertama adalah dialek Mandarin Utara yang digunakan oleh 330 juta penutur di Beijing dan sekitarnya serta di Cina bagian timur laut (Mancuria). Yang kedua adalah dialek Mandarin Barat Laut dengan 80 juta penutur di Provinsi Gansu dan Shaanxi termasuk kelompok etnik Hui yang beragama Islam di Ningxia. Yang ketiga dialek Mandarin Barat Daya dengan 190 juta penutur yang tinggal di Sichuan, Yunnan, dan Hubei. Yang keempat adalah dialek Mandarin Timur dengan 80 juta penutur yang tinggal di sekitar hilir Sungai Yangzi termasuk yang di sekitar Nanjing, dan yang kelima adalah dialek-dialek yang penuturnya tersebar di Cina Selatan dan Taiwan sebanyak lima juta.

Selain subbahasa Sinitik *Beifanghua* atau Mandarin, kurang dari sepertiga seluruh penutur bahasa Sinitik terdiri dari delapan subbahasa Sinitik lainnya, yang penuturnya sebagian terbesar tersebar di Cina Selatan. Yang pertama adalah bahasa Yue atau bahasa Kanton yang digunakan di Provinsi Guangdong (baca: kuangtung), Guangxi (baca: kuangshi) dan Hongkong. Yang kedua adalah bahasa Wu yang digunakan di Shanghai, Provinsi Jiangsu (baca: ciangsu), dan Provinsi Zhejiang (baca: ceciang). Yang ketiga adalah bahasa Xiang (baca: shiang) yang digunakan di Provinsi Hunan, tempat kelahiran Mao Zedong (baca: maotsetung). Yang keempat adalah bahasa Gan (baca: kan) dengan penuturnya tersebar di Provinsi Jiangxi (baca: ciangshi). Yang kelima adalah bahasa Minnan yang digunakan orang-orang di Provinsi Fujian Selatan (atau yang lebih dikenal dengan nama Hokkian), sebagian besar penduduk Taiwan dan Pulau Hainan. Yang keenam adalah bahasa Minbei (baca: minpei) digunakan penduduk Provinsi Fujian Utara. Yang ketujuh adalah bahasa Huizhou yang digunakan oleh orang-orang Hakka yang tinggal tersebar di Cina Selatan termasuk Provinsi Sichuan (Moser 1985). Kedelapan subbahasa Sinitik ini berdiri sejajar dengan subbahasa Sinitik yang disebut pertama, yaitu *Beifanghua* atau Mandarin, dan bukan sekadar dialek dari bahasa Mandarin. Yang menjadi ukuran di sini adalah "saling mengerti." Jika dua orang penutur menggunakan tuturan masing-masing untuk bercakap-cakap dan yang satu tidak bisa mengerti tuturan yang digunakan lawan bicaranya, maka kedua

tuturan tersebut merupakan dua bahasa tersendiri dan bukan sekadar dialek-dialek dari satu bahasa.

Selain subbahasa Sinitik, masih ada bahasa-bahasa yang non-Sinitik seperti bahasa Tibet, Mongol, Manchu, Uyghur, Zhuang, dan lain-lain. Tentu saja setiap subbahasa Sinitik masih terdiri dari puluhan, bahkan mungkin ratusan dialek. Agaknya, bagi 1,2 miliar penduduk RRC yang tersebar di wilayah yang begitu luas, sulit sekali untuk bisa bersepakat menggunakan satu jenis tuturan.¹ Ketika Mao Zedong masih jaya, orang-orang Beijing, katanya, sering menemui kesulitan untuk menangkap pidato Mao yang menggunakan dialek Hunan. Oleh karena itu, pemerintah sekarang berusaha agar seluruh penduduk RRC bisa menggunakan satu jenis bahasa untuk komunikasi lisan, yaitu bahasa baku yang didasarkan pada *Beifanghua* dialek Beijing.

Keanekaragaman bahasa di Cina, bahkan di kalangan kelompok etnik Han sendiri, walaupun sangat menentukan keanekaragaman etnik, belum memberi gambaran yang lengkap. Unsur lain yang juga menentukan keanekaragaman penduduk Cina adalah antara lain seni musik, folklor, masakan, upacara dan adat perkawinan, pakaian, arsitektur bangunan maupun desa, pola pemukiman, dan organisasi sosial terutama kekerabatan.

SISTEM KEKERABATAN

Di dalam masyarakat Cina (terutama sebelum RRC berdiri), pranata sosial yang paling penting adalah keluarga. Memahami keluarga membantu kita memahami kehidupan orang Cina dan sikap kaum pria dan kaum perempuan yang membentuk keluarga tersebut (Lang 1946). Pada masa lampau keluarga memainkan peran yang sangat menentukan dalam masyarakat Cina. Keluarga Cina merupakan mikrokosmos dan merupakan bentuk miniatur suatu negara. Dulu, keluargalah yang merupakan unit sosial yang paling kecil, bukan orang-seorang (individu), dan keluarga juga merupakan unsur yang bertanggung jawab dalam kehidupan politik di wilayahnya (Fairbank 1983).

Namun, istilah "keluarga" yang sudah menjadi kata sehari-hari yang umum dalam ilmu-ilmu sosial, sebenarnya menjadi lebih rumit apabila diterjemahkan ke dalam "keluarga" Cina atau *jia*, dan sebaliknya. Para pakar ilmu-ilmu sosial Cina maupun yang dari luar Cina merasa perlu membuat penyesuaian sedikit apabila istilah "keluarga" diterapkan untuk satuan kekerabatan yang terdapat dalam masyarakat Cina tersebut. Lang, misalnya, mengemukakan bahwa *jia* ('keluarga') atau *jiating* ('satuan keluarga') adalah sebuah satuan yang hubungan para anggotanya didasarkan pada hubungan darah, perkawinan, atau adopsi, dan memiliki anggaran dan harta bersama. Selanjutnya dikatakan bahwa "keluarga" tersebut bisa hanya terdiri dari seorang laki-laki, isteri atau isteri-isterinya dan anak-anak belum menikah. Namun, "keluarga" bisa juga terdiri dari

¹ Penduduk Eropa Barat yang wilayahnya tidak seluas wilayah RRC saja menggunakan begitu banyak bahasa yang berbeda sekali struktur maupun lafalnya.

yang tersebut di atas ditambah dengan seorang anak lelaki atau lebih yang sudah beristeri dan beranak, semuanya tinggal di bawah satu atap dan hidup dengan satu anggaran yang diatur oleh kepala keluarga, yaitu lelaki tertua dari generasi tertua (Lang 1946). Seorang murid Malinowski, Fei Xiao Dong, yang pernah mengadakan penelitian di sebuah desa dekat Danau Dai, yaitu Gaixian'gong tidak jauh dari kota pelabuhan Shanghai, di perbatasan Provinsi Jiangsu dan Zhejiang, menambahkan bahwa sebuah "keluarga" mungkin juga mencakup kerabat dari pihak ayah yang agak jauh. Para anggota keluarga selain memiliki harta dan anggaran bersama, juga bekerja sama mencari nafkah melalui pembagian kerja yang diatur oleh kepala keluarga (Fei 1962).

Sementara itu, M. C. Yang berdasarkan penelitiannya di Taitou, sebuah desa di Provinsi Shandong (1966), berpendapat bahwa *jia* bukanlah sekadar sekelompok orang yang memiliki hubungan kekerabatan, tetapi juga berarti "keluarga" maupun "rumah tinggal." Dikatakan pula bahwa *jia* adalah sebuah organisasi yang amat kompleks yang meliputi dan mengatur anggota "keluarga," harta "keluarga," hewan piaraan, reputasi, dan tradisi "keluarga," serta dewa-dewa pelindung "keluarga." Lagi pula, anggota "keluarga" mencakup juga generasi yang belum dilahirkan dan leluhur yang sudah lama meninggal. Itulah sebabnya mengapa mereka dengan sungguh-sungguh dan rajin merawat dan melindungi makam para leluhur, gedung pertemuan kaum kerabat tempat memperingati para leluhur, dan altar keluarga karena semuanya itu mewakili roh para leluhur. Dengan demikian, mereka dianggap sebagai anggota keluarga yang benar-benar ada dan masih hidup. Para orang tua ingin sekali melihat anak-anak mereka, terutama yang laki-laki, menikah secepatnya dan menghasilkan keturunan. Oleh karena itu, mereka, para orang tua itu, hidup sangat hemat untuk mengumpulkan kekayaan demi hari depan anak-anaknya yang sudah lahir maupun yang belum. Pada peristiwa-peristiwa tertentu, terutama pada hari raya tahun baru, ketika ikatan kekerabatan terasa sangat kuat, seluruh anggota "keluarga" mengundang para leluhur mereka yang "hidup di dunia mereka sendiri" untuk hadir pada pesta itu. Seluruh "keluarga" itu juga menjalankan upacara yang melambangkan kelahiran anak-anak yang belum lahir. Mereka percaya bahwa para leluhurnya masih mengendalikan kehidupan keturunan yang hidup di dunia ini, sedangkan keturunan yang belum lahir mempunyai hak untuk "menentukan kesejahteraan keluarga" yang kelak akan dimasukinya (Yang 1966).

Menyadari keanekaragaman penggunaan istilah "keluarga" apabila atasan diterapkan pada situasi di Cina, maka akhir-akhir ini ada pakar antropologi yang menganggap bahwa rekan-rekannya terdahulu, baik dari Cina maupun Eropa atau Amerika, tidak membedakan antara "keluarga" yang ideal dengan juga kenyataannya. Pada hakikatnya "keluarga" yang ideal bukanlah "keluarga" yang banyak dan umum terdapat di Cina. Menurut Baker (1979), "keluarga" yang ideal adalah sekelompok kerabat yang terdiri dari lima generasi yang hidup sebagai satu satuan, memiliki anggaran bersama, makan dari satu dapur bersama, dan dipimpin oleh

seorang kepala "keluarga." "Keluarga" semacam ini hanyalah merupakan cita-cita yang ingin dicapai setiap "keluarga" yang bisa tumbuh dan berkembang. Pada kenyataannya kebanyakan tidak mampu menunjang "keluarga" semacam itu. Lagi pula sekalipun mereka mampu, maka *jiazhang* atau kepala keluarga yang biasanya adalah pria tertua dari generasi tertua tentunya sudah berumur antara 80-100 tahun, umur yang terlalu tua untuk bisa memimpin sebuah keluarga dengan efektif dan berwibawa.

Berkenaan dengan besarnya jumlah anggota, maka "keluarga besar" dengan beberapa anak laki-laki yang sudah menikah dan mempunyai banyak anak, tetapi masih tinggal dengan orang tuanya di bawah satu atap, sering dianggap sebagai bentuk keluarga yang tipikal Cina. Namun, para pakar sosiologi, antropologi, dan demografi (seperti Fairbank 1983; Freedman 1958; Yang 1965a; Tauber 1970) mengatakan bahwa jumlah anggota sebagian besar keluarga Cina hanya berkisar antara empat sampai enam orang saja, sehingga agak sulit dipercaya jika keluarga tersebut terdiri dari tiga generasi yang tinggal di bawah satu atap. Levy mencoba menjelaskan perbedaan pendapat ini dengan mengatakan bahwa memang harus dibedakan antara kehidupan kaum *shenshi* yang pada umumnya terpendang, berpendidikan, kaya, dan berkuasa di pedesaan dan kaum petani yang pada umumnya miskin. Selanjutnya, dikatakan bahwa sekalipun kaum *shenshi* mampu mempertahankan keluarga yang terdiri dari beberapa generasi, ada faktor-faktor lain yang juga ikut menentukan pembentukan keluarga besar, yaitu kesehatan para anggota dan panjangnya umur mereka serta ketetapan hati dan kemampuan untuk tinggal bersama-sama sebagai satu satuan sosial. Bagaimanapun juga "keluarga" ideal kaum inilah yang telah dilembagakan mewakili setiap "keluarga" Cina, padahal jumlah kaum *shenshi* sangat tidak maknawi, sedangkan kaum petani jumlahnya lebih dari 85 persen (Levy 1949). Kiranya harus berhati-hati dengan "menerjemahkan" *jia* menjadi keluarga, dan sebaliknya, karena masing-masing bisa bermakna bermacam-macam tergantung pada konteks masyarakat yang menggunakan istilah itu. Yang pasti adalah bahwa kedua istilah itu, *jia* dan keluarga, tidak bisa dipertukarkan begitu saja.

KEHIDUPAN KAUM PETANI DAN "SHENSHI"

Seperti telah dikemukakan, sekalipun kaum petani merupakan bagian terbesar penduduk Cina (kurang lebih 85 persen), kaum *shenshi* yang jumlahnya sangat sedikit, tetapi sangat menonjol itu selalu dianggap mewakili kebudayaan Cina selama lebih dari dua ribu tahun terakhir ini dalam karya-karya sastra maupun ilmu-ilmu sosial-budaya. Kedua golongan ini, kaum petani dan *shenshi*, hidup dalam dunia yang sangat berbeda dan dipisahkan oleh jurang ekonomi dan sosial yang amat lebar. Kehidupan kaum petani Cina tidak banyak ditulis orang. Sejarah Cina yang meliputi sekitar 4000 tahun, misalnya, hanya menyebutkan beberapa pemberontakan petani. Namun, menyadari betapa pentingnya peran dan kehidupan kaum petani untuk memahami kebudayaan Cina, dalam beberapa puluh tahun terakhir ini para pakar ilmu-ilmu sosial mulai

memusatkan perhatian mereka pada kajian tentang kehidupan kaum petani (seperti Fei Yiao Dong dan murid-muridnya, 1964; Levy 1949, Baker 1968 dan 1979; Chen Ta 1940; Cohen 1970; Fei 1962 dan 1983; Freedman 1966; Fried 1969; Gallin 1967; Kulp 1966; Lang 1946; Parish dan Whyte 1978; J. Potter 1967 dan 1991; S.H. Potter 1983; Tauber 1970; Yin Zi 1983; C. K. Yang 1965a; M. C. Yang 1966; dan lain-lain).

Kaum petani adalah pengolah tanah, apakah mereka memiliki bidang tanah sendiri, menyewa atau sekadar menjadi buruh tani, sedangkan kaum *shenshi* adalah pemilik tanah tetapi tidak pernah mengolah tanah itu sendiri untuk ditanami pangan. Karena sebagian besar petani itu miskin dan tidak memiliki tanah, maka kelompok kekerabatan yang paling dasar, yaitu *jia*, sangat kecil, biasanya dalam bentuk keluarga batih. Hanya dalam kasus tertentu yang amat sedikit jumlahnya, bentuk *jia* ini bisa mencakup anak laki-laki yang sudah menikah atau orang tua yang sudah tidak bisa mencari nafkah. Organisasi sosial para petani yang lebih besar daripada *jia* adalah semacam "paguyuban tetangga" yang hanya berfungsi memberikan bantuan seremonial dan rekreasi. Organisasi yang lebih besar seperti yang mencakup seluruh desa, terutama sekali diatur dan dikendalikan oleh kaum *shenshi* walaupun anggotanya kebanyakan terdiri dari kaum petani.

Pada pihak lain, kaum *shenshi*, yang biasanya dikenal karena segi intelektualitasnya, merupakan kelompok orang yang mengendalikan sistem administrasi, legislatif, dan yudikatif negara di daerah. Mereka tidak pernah menjadi pekerja kasar untuk mendapatkan nafkahnya. Kaum *shenshi* membentuk dan mengembangkan organisasi kekerabatan yang besar, kuat, seperti *zu* (baca: tsu) karena merasa perlu.² Karena kaum *shenshi* tidak memperoleh nafkahnya dengan mengerjakan sendiri tanah mereka, tetapi menyewakannya kepada orang lain, maka mereka memerlukan perlindungan, keselamatan, dan jaminan keamanan yang hanya bisa didapat dengan jalan membentuk organisasi kekerabatan yang besar. Kelompok kekerabatan seperti *zu* tersebut memang mencakup kaum petani atau golongan ekonomi lemah lainnya asal mereka bisa membuktikan pertalian kekerabatan mereka dengan leluhur bersama itu, tetapi yang memegang pimpinan dan kendali kelompok adalah kaum *shenshi*. Dalam hal ini kedua kelompok saling membutuhkan: kaum *shenshi* memerlukan jumlah anggota yang besar agar bisa menjadi kuat, sedangkan kaum petaninya memerlukan perlindungan, mendapatkan kemudahan, dan ikut menikmati prestise kelompok jika salah seorang anggotanya menjadi pejabat tinggi di pemerintahan daerah maupun pusat. Kelompok kekerabatan seperti *zu* ini banyak terdapat di provinsi-provinsi Guangdong dan Fujian. Pada masa yang lalu, sebelum RRC berdiri, ada *zu* yang begitu besar

²Para pakar antropologi menyebutnya *lineage*, yaitu kelompok kekerabatan yang memiliki harta kekayaan bersama bergerak maupun tidak bergerak. Anggota-anggotanya adalah kaum pria yang bisa membuktikan secara tertulis bahwa dia adalah keturunan leluhur pria yang sama menurut garis pria. Ada juga pakar sosiologi Cina yang menyebut kelompok kekerabatan semacam ini sama dengan *klan*.

sehingga meliputi seluruh penduduk sebuah desa kecuali satu dua orang saja. Dengan kata lain, hampir semua orang di desa memiliki nama marga (*xing*, baca: shing) yang sama. Jadi, mereka, satu dengan yang lain, ada pertalian kekerabatan.

Kekuatan dan keamanan juga diperoleh kaum *shenshi* melalui persekutuan keluarga-keluarga yang kuat, yaitu melalui perkawinan. Oleh karena itu, bagi kaum *shenshi* perkawinan harus diatur orang tua agar mereka bisa mempertahankan bahkan menambah kekuatan kelompok kekerabatan mereka. Sementara itu bagi kaum petani, sekalipun perkawinan juga diatur oleh orang tua, pertimbangannya berbeda, yaitu agar memperoleh menantu perempuan yang mempunyai kemampuan fisik untuk menghasilkan keturunan dan untuk membantu pekerjaan di rumah atau di sawah-ladang. Kaum petani lebih memikirkan bagaimana memperoleh pangan dengan mengolah tanah sendiri atau orang lain, atau dengan menjual tenaga. Tidak seperti kaum petani yang hidup di desa di dekat tanah olahannya, kaum *shenshi* tinggal di pusat-pusat pemerintahan lokal di kota-kota kecil atau besar dengan segala kelengkapan, kemudahan, dan kemewahannya.

Dengan kehidupan yang sudah mapan, kaum *shenshi* mempunyai waktu dan kesempatan untuk menikmati pendidikan, yaitu sarana untuk bisa meningkatkan kedudukannya di masyarakat. Hanya melalui pendidikanlah seseorang bisa mengikuti ujian negara dan kemudian bisa diangkat menjadi pejabat pemerintah yang berkuasa di wilayahnya. Mereka kemudian juga bisa memberikan pendidikan kepada anak-anak laki-laki mereka agar kekuasaan dan kekayaannya bisa diteruskan oleh keturunannya sendiri. Dengan demikian, selama dua ribu tahun lebih hanya kaum *shenshi* saja yang mendapat kesempatan memperoleh pendidikan, suatu batu loncatan untuk menjadi pejabat pemerintahan. Sekalipun jumlahnya tidak maknawi, kaum *shenshi* yang sekaligus merupakan tuan tanah, cendekiawan, dan pejabat pemerintah yang memiliki kekuatan, kekayaan, dan prestise itu menguasai dan menentukan kehidupan seluruh masyarakatnya.

PERAN RELIGI DALAM MASYARAKAT CINA

Dari pengalaman di Indonesia kita mengira bahwa semua orang Cina, atau sekurang-kurangnya sebagian besar orang Cina, memeluk agama Buda. Tentu saja ini disebabkan karena secara formal menurut angka-angka statistik di Indonesia, pemeluk agama Buda memang kebanyakan warga kelompok etnik Cina. Angka statistik tersebut muncul karena, jika orang Cina di Indonesia, yang tidak memeluk agama Kristen atau Islam, diharuskan memilih satu di antara lima agama yang diakui resmi oleh Pemerintah Republik Indonesia, maka agama Buda adalah pilihan yang paling "dekat" dengan keyakinan religius mereka.

Pada hakikatnya kebanyakan orang Cina memeluk keyakinan yang oleh para pakar sosiologi agama disebut "agama klasik" (Cina), "agama tradisional" (Cina), atau "agama rakyat" (Cina), atau, karena tidak ada

sebutannya, maka keyakinan religius itu disebut saja "agama Cina." Jika ditanya mengenai agama yang dipeluknya, secara jujur warga masyarakat tradisional Cina akan bingung dan mungkin akan menjawab bahwa mereka "bai shen" (baca: pai shen) yaitu "memuja dan menyembah *shen*" (arwah). Sikap tersebut mendorong seorang pakar antropologi, Elliott (1955) menyebut keyakinan religius orang Cina ini *shenisme*. Apa pun namanya, keyakinan religius ini besar perannya dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari masyarakat tradisional Cina. Religi klasik Cina atau *shenisme* itu termasuk apa yang oleh seorang pakar sosiologi agama, C. K. Yang, disebut religi "baur," untuk membedakan dengan jenis religi yang lain, yaitu religi institusional seperti Islam, Protestan, Katolik, Buda, dan Tao. Menurut C. K. Yang, religi institusional yang jelas merupakan pranata tersendiri, terpisah dari pranata sosial lainnya yang sekuler, memiliki teologinya sendiri, bentuk pemujaan lambang-lambang (seperti dewa, arwah dan pencitraannya) dan ritualnya sendiri, serta organisasi "kependetaan" sendiri yang memberikan penafsiran mengenai pandangan teologis dan memimpin upacara-upacara religius. Jadi, religi institusional tersebut juga memiliki gedung untuk persembahyangan atau pemujaan umum, nabi, dan kitab sucinya sendiri.

Sementara itu, religi baur, seperti misalnya religi klasik Cina, tidak hadir sebagai pranata sosial tersendiri, tetapi membaur dengan pranata sosial lainnya seperti keluarga. Walaupun secara struktural tidak tampak jelas apalagi menonjol seperti halnya dengan religi institusional, religi klasik Cina memainkan peran yang luas dan mendalam di semua segi kehidupan sosial, bahkan ikut memperkokoh stabilitas keluarga. Pemujaan leluhur, misalnya, benar-benar telah terpadu ke dalam keluarga. Sebagai segi yang utama dari kehidupan religius keluarga, pemujaan leluhur merupakan wujud pelestarian sistem kekerabatan yang patrilineal dan hubungan timbal balik antara para leluhur dengan keturunan mereka. Kematian tidaklah menghentikan atau membebaskan seorang anak laki-laki dari tugas-tugasnya terhadap orang tuanya; kematian hanya mengubah bentuk tugas itu (Baker 1972). Upacara kematian dan upacara persembahan sesajian untuk arwah leluhur juga telah dipadukan dalam sistem ritual keluarga. Pada waktu menyelenggarakan upacara sembahyang atau pemujaan leluhur, semua anggota keluarga merupakan jemaahnya, sedangkan kepala keluarga berfungsi sebagai pengatur atau pemimpin upacara tersebut dalam kedudukannya sebagai "pendeta." Religi klasik Cina, dalam kedudukannya sebagai religi yang baur, memberikan fungsi religius dan ciri sakral pada pranata yang sekuler seperti keluarga Cina. Lambang-lambang dewa dan roh-roh seperti altar, patung, lukisan, "boneka," bahkan secarik kertas bertulisan banyak terdapat di rumah-rumah tinggal. Pada pihak lain, karena begitu terjalin menjadi satu dengan pranata sekuler, maka kehadiran religi baur, seperti halnya dengan religi klasik Cina, sangat tergantung pada stabilitas dan eksistensi pranata sekuler.

Sekalipun dalam sensus kependudukan, penggolongan menurut agama biasanya juga dimasukkan, agama klasik Cina tidak termasuk salah satu

pilihan. Namun, tidaklah terlalu keliru bahwa masyarakat tradisional Cina, di Cina maupun di luar Cina, sebagian terbesar memeluk apa yang disebut agama klasik Cina. Di Malaysia, misalnya, Tan, memperkirakan bahwa jika agama klasik Cina dimasukkan sebagai salah satu kategori agama, maka 90 persen orang Cina di Malaysia adalah pemeluk agama Klasik Cina (Tan Chee-beng 1983). Dengan demikian, angka untuk pemeluk agama Buda dalam sensus 1970 bukan 78,9 persen, melainkan hanya beberapa persen saja, sedangkan angka untuk "tidak beragama" dan "agama lain-lain" mungkin sekali juga akan masuk golongan agama klasik Cina. Situasi keagamaan di Indonesia tidak terlalu berbeda dengan yang ada di Malaysia.

MASYARAKAT DAN BUDAYA CINA PASCAPROKLAMASI

Selama dua ribu tahun yang lalu tidak ada revolusi sosial yang besar yang mengakibatkan perubahan yang berarti pada pola dasar masyarakat Cina. Perubahan-perubahannya sangat terbatas lingkup kelembagaannya, sedangkan jarak waktu terjadinya satu perubahan dengan perubahan berikutnya terlalu lama sehingga perubahan itu diserap kembali ke dalam sistem kelembagaan yang tradisional. Namun, selama dua ratus tahun terakhir ini sejumlah pemberontakan dan revolusi telah mengguncang dan akhirnya mengubah Cina pada dasarnya. Revolusi Xinhai (baca: shinhai) pada 1911 telah menghancurkan sistem politik dan kenegaraan yang lama dan juga mulai merontokkan jaringan sosial Cina. Namun, beberapa unsur dalam masyarakat dan kebudayaan Cina boleh dikatakan belum goyah sama sekali. Kemudian terjadi lagi revolusi yang dilancarkan Partai Komunis Cina (PKC) yang mencoba menyelesaikan apa yang telah dimulai revolusi sebelumnya.

Para pemimpin PKC dan pemerintah RRC menyadari bahwa setelah Oktober 1949 pun keluarga masih merupakan organisasi sosial yang pokok dan utama di dalam masyarakat Cina. Kesetiaan seseorang pertama-tama ditujukan kepada keluarganya. Seseorang tidak ada artinya dan tidak mempunyai tempat di masyarakat jika tidak menjadi anggota suatu keluarga.³ Untuk mengubah kesetiaan seseorang yang ditujukan kepada keluarga atau kelompok kekerabatan yang lebih besar, seperti *zu*, menjadi kesetiaan kepada negara, maka usaha para pemimpin RRC yang pertama-tama adalah menghancurkan kelompok kekerabatan itu, baik yang kecil seperti *jia* maupun yang lebih besar seperti *zu*. Karena perkawinan itu sangat asasi bagi pembentukan sebuah keluarga, maka serangan terhadap lembaga perkawinan akan mengguncang dasar-dasar keluarga dan pada gilirannya akan merombak masyarakat Cina.

Beberapa bulan setelah RRC diproklamasikan, sebuah undang-undang

³ Itulah sebabnya mengapa orang-orang yang "terbuang" bergabung di dalam organisasi rahasia yang dibentuk menyerupai kelompok kekerabatan yang didasarkan pada hubungan darah atau perkawinan.

perkawinan yang baru diumumkan. Pada intinya undang-undang ini didasarkan pada kebebasan pemuda dan pemudi memilih jodohnya sendiri, pada monogami, pada hak yang sama antara laki-laki dan perempuan, dan pada perlindungan kepentingan kaum perempuan dan anak-anaknya. Undang-undang tersebut melarang bigami, pergundikan, perkawinan anak di bawah umur, dan juga melarang penetapan jumlah uang dan pembelian lainnya sebagai syarat perkawinan. Perkawinan harus didasarkan pada keinginan yang sungguh-sungguh dari laki-laki dan perempuan yang akan kawin itu sendiri, tanpa paksaan dan campur tangan orang lain, termasuk orang tua sendiri. Undang-undang perkawinan itu juga menyatakan bahwa suami istri adalah mitra hidup yang memiliki hak dan mempunyai status yang sama. Kaum perempuan juga berhak untuk memilih pekejaannya sendiri (di luar rumah), mencari nafkah dan ikut serta dalam kegiatan-kegiatan sosial maupun politik. Baik laki-laki maupun perempuan berhak memiliki dan mengelola harta keluarga, dan mewarisi harta mitra hidupnya. Seorang perempuan berhak menggunakan nama marganya sendiri, minta cerai, dan memperolehnya jika kedua belah pihak menyetujuinya.

Dampak Undang-undang Perkawinan pada hubungan keluarga sangat besar. Orang tua sebagai kepala keluarga kehilangan kekuasaan terhadap anak-anaknya sendiri maupun menantunya. Anak tidak harus patuh kepada orang tuanya maupun mertua. Akibatnya, antara lain, pola bermukim pascanikah tidak lagi patrilokal, tetapi neolokal. Namun, kadang-kadang, karena kesulitan rumah atau keperluan praktis, banyak juga orang tua yang tinggal dengan anak, perempuan atau pria, yang sudah menikah. Bentrok antara menantu perempuan dan mertuanya juga menyebabkan pasangan baru memisahkan diri dari rumah orang tua. Undang-undang tersebut juga melambangkan kebebasan kaum perempuan, bahkan menaikkan status mereka. Kaum perempuan, misalnya, bisa bekerja di luar rumah untuk mencari nafkah dan mengelola pendapatannya sendiri.

Orang-orang muda, laki-laki dan perempuan, mempunyai kesempatan lebih banyak untuk saling mengenal karena mereka sama-sama bekerja di suatu pabrik, kelompok kerja, proyek-proyek pemerintah, atau karena menghadiri pertemuan-pertemuan sosial atau politik di lingkungan tempat kerja maupun tempat tinggalnya. Kontak antara kaum muda ini lebih sering terjadi dan mungkin berkembang menjadi hubungan yang lebih erat menuju perkawinan. Perkawinan atau perijodohan yang diatur, yang kadang-kadang menyebabkan dua orang yang akan dikawinkan itu tidak pernah bertemu sebelum kawin, berkurang dengan cepat, jika tidak mau dikatakan sudah tidak terjadi lagi. Hak kaum perempuan minta cerai banyak dimanfaatkan pada tahun lima puluhan karena sebelumnya memang masih banyak kaum perempuan yang kawin bukan atas kehendak sendiri, melainkan dikawinkan oleh orang tuanya dengan atau tanpa perantaraan orang lain. Banyak perkawinan sebelum 1949 tersebut merupakan perkawinan anak-anak yang sama sekali tidak tahu makna berumah tangga. Perkawinan semacam itu dilakukan karena para orang tua ingin cepat mendapat kepastian bahwa garis keturunan keluarganya dapat dilanjutkan.

Ada sebuah keluarga yang begitu ingin mendapat kepastian tersebut sehingga keluarga itu "mengambil menantu" perempuan sebelum mempunyai anak laki-laki sendiri. Ketika anak laki-laki mereka lahir, ia sudah disediakan seorang isteri yang sudah jauh lebih tua. Oleh karena itu, ketika Undang-undang Perkawinan 1950 diberlakukan, ada seorang perempuan yang menggendong seorang anak mengunjungi kantor PKC setempat untuk minta cerai. Ternyata anak yang digendong itu adalah suaminya.

Namun, pada hakikatnya, perubahan-perubahan di Cina tidak terjadi dalam satu malam. Tradisi dan nilai-nilai yang telah dipertahankan beratus-ratus tahun di Cina rupa-rupanya tidak bisa dibuang begitu saja dengan sebuah undang-undang. Banyak golongan yang menentang undang-undang baru tersebut, termasuk para pemimpin PKC di pedesaan. Mereka, terutama para ayah, merasa bahwa undang-undang tersebut mengancam sistem hubungan dalam keluarga, kekuasaan kepala keluarga, maupun kelangsungan keluarga itu sendiri. Sebelumnya, hubungan ayah dan anak laki-lakinya merupakan hubungan yang paling penting di antara hubungan-hubungan yang lain, namun sesudah Undang-undang Perkawinan 1950 itu, hubungan suami-isterilah yang paling utama dan paling penting. Namun, penelitian di pedesaan Provinsi Guangdong menunjukkan bahwa pada 1970 beberapa unsur dalam hubungan tradisional anggota-anggota keluarga masih dilanjutkan. Misalnya, isteri masih tampak takut-takut di hadapan suaminya di muka umum dan harus menanggung pekerjaan yang lebih berat dalam rumah tangganya. Lagi pula, dalam kehidupan keluarga umur masih merupakan faktor penting sehingga orang muda harus menghormati yang lebih tua.

Menurut mereka yang menentang, urusan perkawinan adalah urusan keluarga dan bukan urusan orang-per-orang yang akan menikah. Lagi pula pemerintah mestinya tidak ikut campur dalam urusan perkawinan warganya. Kaum pria yang sudah biasa hidup dalam masyarakat yang sangat *male chauvinistic*, seperti kebanyakan masyarakat di Asia, juga merasa terancam kedudukan dan kewenangannya dalam masyarakat jika undang-undang yang baru itu berlaku. Undang-undang Perkawinan 1950 itu, jika dijalankan dengan benar, akan meningkatkan status perempuan dan memberi kebebasan serta kedudukan yang sama dengan kaum pria.

Karena banyaknya tentangan dan tantangan, terutama dari kaum pria dan generasi tua di pedesaan, pemerintah RRC lalu melancarkan kampanye pada 1953 agar undang-undang, yang sesungguhnya bisa diharapkan membawa perubahan yang drastis itu, berlaku dengan efektif dan lebih cepat. Pada 1966, Mao Zedong yang sudah habis kesabarannya menunggu perubahan yang tidak kunjung terjadi, melancarkan apa yang disebut "Revolusi Kebudayaan" untuk menciptakan masyarakat Cina yang baru dengan menghancurkan segala sesuatu yang ada kaitannya dengan kebudayaan yang lama. Sebagaimana diketahui "revolusi" yang menggunakan atau menyalahgunakan para remaja itu berakhir dengan kekacauan sehingga pemerintah merasa perlu meminta bantuan angkatan

bersenjatanya memulihkan situasi yang kacau-balau yang mengakibatkan banyak korban itu.

Sekali lagi pranata, tradisi dan nilai-nilai yang sudah berjalan berabad-abad menunjukkan ketangguhannya dalam sejarah, dan setelah Mao Zedong meninggal, tradisi yang lama kembali dengan perlahan-lahan. Gereja dan rumah ibadah lainnya, misalnya, sedikit demi sedikit memperoleh kembali jemaahnya. Demikian pula orang-orang mulai diperbolehkan memiliki usaha swasta, memiliki dan mengolah tanahnya sendiri, dan sebagainya. Namun, keadaan pada tahun delapan puluhan sudah jauh berbeda dengan tahun empat-lima puluhan. Penduduk bertambah dengan sangat cepat. Angka satu miliar dilampaui begitu saja, maka pemerintah tidak bisa berbuat lain daripada mengeluarkan peraturan yang boleh dikatakan melarang keluarga mempunyai anak lebih dari satu. Seorang ibu yang sudah mengandung beberapa bulan didatangi petugas partai setiap hari sehingga lama-kelamaan perempuan itu merasa diintimidasi untuk menggugurkan kandungannya. Sementara itu, kandungannya sudah berumur empat bulan lebih.

Dengan kebijakan politik 'satu anak untuk satu keluarga' maka kelanjutan garis keturunan keluarga dan sistem kekerabatan yang patrilineal ikut terancam. Jika suatu keluarga hanya mempunyai satu anak dan anaknya perempuan, maka mereka mau tidak mau harus mengakui persamaan hak perempuan dengan kaum pria sebagai anggota kerabatnya jika garis keturunan keluarganya tidak mau dianggap terputus sampai sekian karena anak gadisnya menikah. Juga bisa dibayangkan bahwa jika kebijakan anak satu tersebut berlaku terus, maka pada suatu waktu dalam abad ke-21 istilah 'adik', 'kakak', 'paman', dan 'bibi' merupakan kata-kata yang kuno dan bisa kehilangan acuannya dalam masyarakat dan kebudayaan Cina.

RRC yang makin lama makin membuka diri terhadap dunia luar setelah 1970-an juga tidak dapat menghindari pengaruh budaya non-Cina yang datang dari seluruh penjuru dunia. Oleh karena itu, seperti halnya kebanyakan kebudayaan, perubahan-perubahan budaya, mau tidak mau, akan terjadi dengan cepat pada masyarakat Cina yang dalam sejarah terkenal "tidak pernah berubah" itu.

PASANG SURUT KAJIAN CINA DI INDONESIA

Sejak 1940 Fakultas Sastra Universitas Indonesia merupakan satu-satunya perguruan tinggi pemerintah yang membuka Program Studi Cina. Baru kemudian pada awal 1980-an sebuah perguruan tinggi swasta di Jakarta, yaitu Universitas Darma Persada membuka program studi serupa. Dengan segala kekurangannya, kedua program studi tersebut baru dapat menghasilkan lulusan berjenjang sarjana yang tentu saja pengetahuannya belum dapat dikatakan memenuhi keinginan para pengguna jasa mereka. Namun, beberapa instansi pemerintah dan perusahaan swasta seperti Departemen Luar Negeri, Departemen Kehakiman, Departemen Keuangan,

Departemen Pertahanan Keamanan, Kejaksaan Agung, Kepolisian, badan-badan intelijen, perusahaan penerbangan, pemancar televisi swasta, lembaga-lembaga penelitian, universitas, dan kursus-kursus Bahasa Cina yang dikelola perusahaan swasta sudah pernah atau masih menggunakan tenaga lulusan kedua perguruan tinggi tersebut. Dengan bidang kajian yang begitu luas, program sarjana baru mampu memperkenalkan sebagian kecil dari pengetahuan yang elementer mengenai masyarakat dan kebudayaan Cina. Jelas, masih perlu dibuka jenjang-jenjang berikutnya.

Harus diakui bahwa kajian mengenai Cina di Indonesia tidak bisa dilepaskan dari kehidupan politik. Hal itu bisa dilihat dari diaturnya penggunaan bahasa dan aksara Cina dalam ketetapan MPR (Majelis Permusyawaratan Rakyat). Program Studi Cina (pada waktu itu disebut Jurusan Sastra Cina) di perguruan tinggi juga tidak luput dari pengaruh hubungan politik RI-RRC yang sempat memburuk setelah peristiwa Gerakan 30 September (G-30-S) 1965. Mungkin karena takut disangkutkan dengan tragedi tersebut, para lulusan Sekolah Menengah Umum yang ingin masuk jurusan Cina di perguruan tinggi dapat dihitung dengan jari satu tangan, padahal penerimaan mahasiswa pada waktu itu sangat mudah. Memang pada waktu itu ada beberapa pengajar yang dianggap “tidak bersih lingkungan” sehingga harus diberhentikan, namun sebenarnya tindakan itu tidak berarti bahwa belajar tentang masyarakat dan kebudayaan Cina termasuk bahasanya harus dicurigai, atau bahkan dipersulit.

Masih dapat diingat bahwa pada masa itu, majalah berbahasa Inggris seperti *The Far Eastern Economic Review* yang terbit di Hongkong tidak boleh segera beredar, salah satu atau beberapa nomornya, sebelum aksara-aksara Cina yang digunakan untuk iklan minuman keras atau obat-obatan dicat hitam agar tidak terbaca sama sekali. Mereka tidak peduli apakah tulisan itu berbahaya secara politis maupun moral (pornografi) atau tidak. Aksara Cina itu sendiri sudah cukup “berdosa” jadi cukup merupakan alasan untuk dilarang.⁴ Anehnya, beberapa tahun kemudian, yaitu tahun tujuh puluhan dan seterusnya, bermunculan restoran-restoran Jepang dengan nama yang ditulis dengan Kanji. Pemilik atau pengelola restoran Jepang itu tidak ditegur atau dihukum walaupun menggunakan Kanji yang tidak lain adalah aksara Cina. Seperti telah disebutkan pada awal tulisan ini, Kanji adalah lafal Jepang untuk Hanzi atau aksara Han atau secara umum di Indonesia disebut

⁴ Untuk membantu mengatasi berbagai kesulitan yang dihadapi Program Studi Cina, antara lain karena larangan masuk dan beredarnya barang cetakan beraksara Cina di Indonesia, tiga puluh tahun yang lalu saya sudah beberapa kali mengemukakan pemecahannya kepada beberapa pihak yang kebetulan memegang jabatan yang menentukan. Saya juga minta agar mereka membantu penyelenggaraan dan perkembangan Program Studi Cina di Fakultas Sastra Universitas Indonesia dengan memberikan beberapa kemudahan atau kekecualian. Namun, para petugas yang ada di garis depan, yaitu di bandara dan pelabuhan, tentu saja hanya berpegangan pada peraturan atau larangan yang berlaku pada waktu itu sehingga buku-buku ilmu pengetahuan atau pelajaran yang menggunakan aksara Cina, sebagian atau semuanya harus ditahan untuk waktu yang tidak terbatas dan akhirnya lenyap.

aksara Cina.

Baru pada 1994 pemerintah melonggarkan larangan yang tertera pada Ketetapan MPR 1966 itu dengan mengeluarkan peraturan yang mengizinkan penggunaan aksara dan bahasa Cina untuk keperluan pariwisata asalkan brosur atau selebaran promosinya dicetak di *Harian Indonesia*, Jakarta, satu-satunya harian berbahasa Cina (dan Indonesia) di Indonesia. Sebenarnya pada 1993 di Bali sudah diedarkan brosur-brosur penjelasan mengenai pertunjukan kesenian dalam bahasa dan aksara Cina untuk para wisatawan yang hanya dapat berbahasa Cina. Pemerintah juga mengizinkan pembukaan kursus-kursus bahasa Cina untuk memenuhi kebutuhan perusahaan-perusahaan akan pemandu wisata atau pegawai biro perjalanan yang harus melayani wisatawan yang berbahasa Cina. Agak menggelikan dan menggelisahkan jika untuk menghasilkan pemuda-pemudi agar bisa berbahasa Cina Mandarin hanya disediakan waktu tiga sampai enam bulan saja, sekalipun sekadar sampai tingkat *survival Chinese*. Masalah kecil lainnya adalah bahwa yang diajarkan di kursus-kursus tersebut adalah bahasa Mandarin, yaitu bahasa nasional di RRC atau Taiwan yang baku, sedangkan para wisatawan belum tentu bisa berbahasa Mandarin karena mereka datang dari daerah Cina Selatan. Seorang pejabat Indonesia baru-baru ini memulangkan beberapa ratus nelayan RRC yang masuk ke Indonesia secara ilegal. Seorang pejabat kedutaan RRC yang ikut mengurus pemulangan para nelayan itu berasal dari Cina Utara, sedangkan para nelayan adalah orang-orang pedesaan pantai Provinsi Zhejiang yang letaknya bertetangga dengan Provinsi Fujian, jadi masih masuk Cina Selatan. Pejabat kedutaan RRC agak mendapat kesulitan berkomunikasi dengan para nelayan yang menggunakan bahasanya sendiri atau salah satu dialek Mandarin yang tidak begitu lazim di Cina Utara.

Kebutuhan akan pakar mengenai masyarakat dan kebudayaan Cina maupun tenaga-tenaga untuk keperluan praktis seperti penerjemah dan juru bahasa, misalnya untuk pengadilan, sudah sangat mendesak, baik untuk instansi pemerintah maupun perusahaan-perusahaan swasta. Namun, seperti telah disebutkan, "pabrik" yang harus memproduksi pakar dan tenaga kerja tersebut hanya satu ditambah satu perguruan tinggi swasta. Mengingat kebutuhan akan pakar dan tenaga terampil tersebut begitu banyak, perlu kiranya dibuka program-program studi (sampai jenjang pascasarjana) di beberapa perguruan tinggi negeri lainnya.

DAFTAR ACUAN

- Baker, H. D. R. (1979) *Chinese Family and Kinship*. New York: Columbia University Press.
 Ch'en Ta (1940) *Emigrant Communities in South China*. Institute of Pacific Relations.
 Cohen, M. L. (1970), "Developmental Process in the Chinese Domestic Group," dalam Freedman M. (ed.), *Family and Kinship in Chinese Society*.
 Fairbank, John K. (1983) *The United States and China*. Cambridge: Harvard University Press
 Fei Hsiao-Tung (Fei Xiao Dong) (1962) *Peasant Life in China*. London Routledge & Kegan Paul.
 --- (1983) *China Village Clove-up*. Beijing: New World Press.

- (1983-84) "On Changes in the Chinese Family Structure," dalam D. S. K Chu (ed.), *Sociology and Society in Contemporary China 1979-1983*. Armonk: M. E. Sharpe.
- Freedman, M. (1966) *Chinese Lineage and Society: Fukien and Kwangtung*. London School of Economic Monographs on Social Anthropology, 18.
- (1979), "Ritual Aspects of Chinese Kinship and Marriage," dalam G. W. Skinner (ed.), *An Introduction to Chinese Civilization*. Stanford: Stanford University Press.
- Fried, M. (1973) "China: An Anthropological Overview," dalam J. T Meskill (ed.), *An Introduction to Chinese Civilization*. Lexington: D. C. Heath & Company.
- Jin Yao Ji (1992) *Zhongguo Shihui Yu Wenhua* (Masyarakat dan Kebudayaan Cina) Niu Jin Daxue Chubanshe (Niu Jin University Press).
- Kulp D. H. (1966) *Country Life in South China*. Taipei: Ch'eng-wen Publishing Company.
- Lang, O. (1946) *Chinese Family and Society*. New Haven: Yale University Press.
- Levy Jr., M. J. (1949) *The Family Revolution in Modern China*. Cambridge, Mass: Harvard University Press
- Li, Dun J. (1971) *The Ageless Chinese: A History*. New York: Charles Schribner's Sons
- Moser, L. J. (1985) *The Chinese Mosaic: The People and Provinces of China*. Boulder, Colo.: Westview press.
- Parish, W. L. and M. K. Whyte (1978) *Village and Family in Contemporary China*. Chicago: University of Chicago.
- Potter, S.H, and J.M. Potter (1990) *China's Peasants*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Sinclair, Kevin (1987) *The Forgotten Tribes of China*. Missisauga, Ont.: Cupress.
- Tan Chee-beng (1983) "Chinese Religion in Malaysia: A General View" *Asian Folklore Studies*. Vol 42: 217-252.
- Teuber, I. B. (1970) "The Families of Chinese Farmers," in Freedman, M., ed., *Family and Kinship in Chinese Society*. Stanford: Stanford University Press.
- Yang, C. K. (1965) *The Chinese Family in the Communist Revolution*. Cambridge, Mass.: The MIT Press.
- (1970) *Religion in Chinese Society*. Berkeley: U. C. Press.
- (1973) "The Role of Religion in Chinese Society," in Meskill, J. T., ed., *An Introduction to Chinese Civilization*. Lexington, Mass.: D. C. Heath & Company.
- Yang, M. C. (1966) *A Chinese Image Taitou: Shantung Province*. New York: Columbia University Press.